

batil yang lahir dari ideologi kapitalisme-liberalisme.

Sudah saatnya kaum Muslim menjadikan Islam sebagai satu-satunya solusi atas

semua persoalan kehidupan. Tidak ada ideologi sempurna yang menata kehidupan umat manusia selain Islam. Untuk itu umat harus terus berjuang

menegakkan syariah Islam secara *kâffah* dalam institusi pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah).

Wallâhu a'lam. []

IRAN-AMERIKA BERUNDING, JANGAN LUPAKAN PALESTINA!

Di tengah perundingan dan kesepakatan yang sedang berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat, jangan lupa Palestina yang hingga kini masih berada di bawah penjajahan. Dalam 24 jam terakhir, Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan 9 syuhada dan 41 korban luka akibat agresi Israel. Sejumlah korban lainnya masih tertimbun reruntuhan dan belum dapat dijangkau oleh tim ambulans maupun pertahanan sipil. Sejak gencatan senjata pada 11 Oktober, jumlah korban mencapai 1.021 syuhada dan 3.249 luka-luka. Adapun sejak awal agresi pada 7 Oktober 2023, total korban telah mencapai 73.032 syuhada dan 173.357 luka-luka.

Sementara perhatian dunia tersita oleh perkembangan hubungan Iran dan Amerika Serikat, krisis utama di kawasan telah memasuki fase pascaperang setelah konflik langsung besar antara AS-Israel dan Iran pada Februari-Juni 2026. Kedua pihak kini menempuh jalur perundingan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Islamabad pada 17 Juni 2026 yang mencakup gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade laut terhadap Iran, serta kerangka menuju kesepakatan permanen. Negosiasi lanjutan di Swiss juga terus berlangsung meski diwarnai tarik-ulur kepentingan dan pernyataan yang saling bertentangan.

Namun, di saat AS dan Iran mencari titik temu untuk mengakhiri konflik mereka, tekanan Israel terhadap Gaza tetap berlanjut, sementara front Lebanon masih berada dalam kondisi gencatan senjata yang rapuh. Fakta ini

menunjukkan bahwa meskipun para aktor besar sedang bergerak menuju kompromi dan stabilitas baru di kawasan, penderitaan rakyat Palestina belum berakhir dan penjajahan atas Palestina masih terus berlangsung hingga hari ini.

Karena itu, penting untuk mengingat bahwa akar persoalan Palestina tidak hanya terletak pada keberadaan Israel sebagai penjajah, tetapi juga pada dominasi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dan dunia Islam yang selama ini menjadi penopang utama eksistensi dan kekuatan Israel. Selama dominasi tersebut masih bercockol, penyelesaian konflik Palestina tidak akan menyentuh akar masalah secara mendasar. Oleh sebab itu, upaya yang diperlukan bukan sekadar menghentikan agresi atau mencapai kesepakatan politik sementara, melainkan mengakhiri pengaruh dan hegemoni Amerika di dunia Islam.

Langkah tersebut menuntut adanya persatuan yang kuat di antara negeri-negeri Muslim agar mampu menghadapi tekanan dan dominasi kekuatan global. Tanpa persatuan yang kokoh, dunia Islam akan sulit mengimbangi pengaruh politik internasional yang saat ini masih didominasi Amerika Serikat. Karena itu, persatuan dunia Islam di bawah satu kepemimpinan Khilafah ala Minhajin Nubuwwah merupakan faktor penting untuk membangun kekuatan politik yang mampu melindungi kepentingan umat serta mendukung pembebasan Palestina secara hakiki. **Allahu Akbar. []**

Hikmah

Rasulullah Saw bersabda:

«ثَلَاثٌ لَا يُمْتَنَعُ الْمَاءُ وَالْكَأُ وَالنَّارُ»

"Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli: air, rumput dan api."

(HR Ibnu Majah). []

Buletin Dakwah **KAFFAH**, terbit setiap Jum'at. **Penerbit:** Lembaga Kajian Islam Kaffah. **Alamat:** Menara Hijau, Lantai 7 - Suite 702, Jl. MT. Haryono Kav. 33, RT.03/RW.02, Kel. Cikokol, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan - 12770.

Marketing: Mursyid Aziz 08787-444-1924 (WA/SMS only). **Infq** Rp. 300/eks. Pemesanan minimal 100 eks

Simpan baik-baik lembaran ini, di dalamnya ada ayat-ayat al-Quran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SOLUSI ISLAM MENGATASI KRISIS ENERGI

KRISIS listrik mulai memukul rakyat Indonesia. Pada bulan Mei lalu hampir semua wilayah di Pulau Sumatera mengalami *blackout* berjam-jam. Bahkan ada yang nyaris 24 jam.

Berikutnya giliran Jawa, Madura dan Bali mengalami pemadaman bergilir. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengakui masalah pasokan batubara ke PLTU menjadi biang kerok pemadaman listrik. Sebabnya, selisih harga jual batubara untuk kebutuhan dalam negeri dengan pasar global sangat jauh. Ini yang menyebabkan produsen cenderung enggan menjual komoditasnya kepada PLN.

Hingga tulisan ini dibuat belum ada kepastian kapan krisis listrik akan selesai. Warga banyak yang menderita. Berbagai kegiatan terkendala. Banyak pengusaha merugi

akibat pemadaman listrik. Sementara itu, tidak ada jaminan kompensasi dari PLN maupun Pemerintah.

Ironi Negara Kaya

Diakui oleh PLN, krisis listrik di Jawa, Madura dan Bali adalah akibat adanya kendala pasokan batubara sebagai bahan bakar PLTU. Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, menyebutkan dari data yang dihimpun bahwa persediaan batubara pada sejumlah PLTU milik grup PLN maupun pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) telah berada pada level yang mengkhawatirkan. Menurut dia, stok batubara di sejumlah pembangkit hanya berada pada kisaran 11 hingga 12 hari operasi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan total

kebutuhan batubara bagi PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah menugaskan perusahaan-perusahaan batubara untuk memenuhi kebutuhan PLN dengan total volume sekitar 190 juta ton. Dari jumlah tersebut baru terkonfirmasi sekitar 150-160 juta ton dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya, masih banyak kekurangan.

Ini adalah ironi. Pasalnya, Indonesia termasuk ke dalam jajaran negara penghasil batubara terbesar di dunia. Pada tahun 2025 Indonesia menghasilkan 790 juta ton.

Waktu Zhuhur

11 Muharram 1448 H/
26 Juni 2026 M
Untuk Jakarta & Sekitarnya

11.59 WIB

Tidak dibaca saat khatib sedang khutbah

Bahkan pada tahun sebelumnya Indonesia berhasil memproduksi batubara sampai 860 juta ton. Lalu mengapa PLN justru kekurangan pasokan batubara?

Semua disebabkan karena produksi batubara di tanah air justru didominasi oleh perusahaan swasta lokal dan asing. Sementara itu, produksi batubara dari Badan Usaha Milik Negara, seperti PT Bukit Asam, tidak mencukupi keperluan PLN. Pada tahun 2024, misalnya, PT Bukit Asam hanya mampu memproduksi 43 juta ton. Padahal PLN membutuhkan pasokan batubara 190 juta ton setiap tahun. Akhirnya, PLN terpaksa membeli batubara medium dari perusahaan-perusahaan swasta.

Pemerintah memang mewajibkan perusahaan tambang batubara swasta menjual produk mereka ke PLN dengan mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), yaitu kewajiban menjual sebagian produksi ke pasar dalam negeri sebelum diekspor. Salah satunya untuk keperluan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN.

Akan tetapi, masalah muncul ketika terjadi selisih tinggi antara harga batubara di pasar dunia yang mencapai 121 dolar AS per ton dengan harga DMO yang hanya 70 dolar AS per ton. Pengusaha tambang batubara menuntut kenaikan harga DMO kepada Pemerintah. Inilah yang menjadi pangkal PLN kesulitan mendapatkan pasokan batubara

sehingga terjadi pemadaman listrik bergilir. Belakangan Pemerintah tampak mengalah dengan berencana menaikkan harga DMO agar bisa diterima oleh para pengusaha tambang.

Liberalisasi Tambang dan Listrik

Apa yang terjadi bukan semata masalah teknis. Semua ini berakar pada *fasad* (kerusakan) tata kelola sektor tambang. Pangkalnya adalah liberalisasi sektor pertambangan mineral dan batubara yang justru dibuat oleh negara. Liberalisasi tambang minerba ini berlaku sejak pengesahan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan pada awal era Orde Baru. UU ini memperkenalkan sistem kontrak dengan perusahaan swasta dan asing melalui skema Kontrak Karya (KK) serta Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Berkali-kali regulasi sektor tambang dibuat justru makin mengokohkan kekuasaan perusahaan tambang swasta. Peneliti Indonesian Resources Studies (IRESS), Dr. Marwan Batubara, menilai perubahan UU Minerba sarat dengan kepentingan oligarki. Bahkan menurut dia, BUMN kini hanya menguasai 5–10% sektor batubara. Selebihnya didominasi oleh swasta besar. Akibatnya, mereka bisa mengatur dan menekan harga batubara, termasuk kewajiban DMO

yang ditetapkan oleh negara.

Liberalisasi ini bukan hanya di sektor pertambangan, tetapi di kelistrikan. Sejak tahun 90-an negara mengizinkan swasta memproduksi listrik dengan sebutan Independent Power Producer (IPP). Lalu muncullah UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. UU ini makin menegaskan bahwa penyediaan listrik bisa dilakukan oleh pihak swasta. Ironinya, penyedia listrik swasta menjual produknya ke PLN dengan pola TOP (*Take-or-Pay*). Artinya, PLN tetap harus membayar listrik ke pihak swasta meski belum terpakai. Akibatnya, PLN sering mengalami kelebihan pasokan listrik. Kondisi ini yang menambah berat beban keuangan PLN.

Oligarki pertambangan batubara dan listrik bisa berjaya karena sebagian pemiliknya dekat dengan lingkaran kekuasaan. Di antaranya ada kepala daerah, pejabat negara, anggota dewan atau karib kerabat mereka. Akhirnya, lahirlah konflik kepentingan, dan penyimpangan kekuasaan yang ujungnya merugikan rakyat. Inilah '*serakahnomics*' ala kapitalisme.

Bahayanya, kaum oligarki bisa lebih berkuasa ketimbang negara. Mereka bisa membajak kebijakan negara dan mengatur regulasi demi keserakahan. Bahkan mereka bisa mendompleng penguasa atau anggota dewan. Muncullah fenomena 'peng-peng'; penguasa merangkap pengusaha.

Beginilah wajah asli ideologi Kapitalisme: kendali politik ada di para pemilik modal/kapital. Seruan kedaulatan rakyat ala demokrasi hanyalah slogan kosong untuk mengokohkan keserakahan mereka.

Solusi Islam

Sebagai ideologi sempurna, Islam menata kepemilikan dan pengelolaan sektor tambang dan energi, termasuk listrik. Dalam Islam, pertambangan dengan deposit besar masuk ke dalam kepemilikan umum (*milkiyyah 'aammah*) yang wajib dikelola oleh negara. Haram diserahkan kepada pihak swasta. Nabi saw. bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلِّ وَالنَّارِ»

Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api (HR Ibnu Majah).

Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah saw. juga pernah menarik kembali pemberian tambang garam yang sudah terlanjur diberikan kepada Abyad bin Hammal ra. Hal itu dilakukan setelah beliau diberitahu bahwa tambang itu memiliki deposit yang besar.

Nas-nas di atas menetapkan bahwa tambang dengan deposit besar adalah milik umum yang harus dikelola oleh negara semata-mata demi kemaslahatan rakyat.

Dengan kebijakan ini, tambang akan menjadi sumber

pemasukan sangat besar untuk kas negara. Nilai ekspor batubara Indonesia pada Januari hingga November 2025, misalnya, mencapai 22,17 miliar dolar AS. Jika dirupiahkan hari ini, angka itu setara dengan Rp 395 triliun. Biaya sebesar itu bisa digunakan untuk membangun 1.300 – 2.000 sekolah berstandar tinggi secara nasional, atau untuk membangun sampai 500 rumah sakit berstandar tinggi grade A-B.

Dalam Islam sektor kelistrikan juga termasuk milik umum yang harus dikelola oleh negara. Baik yang menggunakan tenaga uap (PLTU), geothermal maupun tenaga nuklir (PLTN). Hanya negara yang boleh memiliki pembangkit listrik besar untuk kebutuhan rakyat seperti untuk rumah tangga, sekolah, rumah sakit, kantor-kantor Pemerintah, transportasi semisal KRL, ataupun industri. Kebutuhan listrik harus dipenuhi oleh negara untuk semua golongan di seluruh pelosok negeri. Dalam hal ini negara bisa menetapkan kebijakan cuma-cuma jika memungkinkan, atau menetapkan biaya murah semata-mata untuk menutup biaya produksi. Islam mengharuskan negara mencari keuntungan dari pelayanan kepada rakyat.

Negara pun bertanggung jawab kepada rakyat jika terjadi kerusakan atau kerugian akibat pemadaman listrik yang disebabkan oleh kelalaian negara, seperti kerusakan

perangkat elektronik, kebakaran, kerugian usaha, kematian, dsb. Sabda Nabi saw.:

«الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
Imam (kepala negara) itu adalah pengurus rakyat dan hanya dialah yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Mewujudkan Negara Berdaulat

Dengan menerapkan hukum Islam secara *kaffah*, termasuk dalam sektor pertambangan dan kelistrikan, maka rakyat akan terlayani dengan baik. Negara dalam Islam (Khalifah) bakal mampu mengelola kebutuhan listrik secara optimal mulai dari hulu sampai ke hilir; mulai dari pasokan bahan bakarnya hingga jaringannya. Ini merupakan kewajiban negara sebagai bagian *ri'ayah syu'ûn an-nâs* (pengurusan urusan rakyat).

Salah satu dampak positif dari ketentuan ini adalah negara akan benar-benar berdaulat. Terbebas dari tekanan dan intimidasi kaum oligarki. Kepala Negara Islam (Khalifah) akan leluasa membuat kebijakan untuk melayani rakyat sesuai dengan ijtihad dan pendapatnya. Bukan menjadi penguasa yang melayani kepentingan oligarki seperti dalam demokrasi.

Penutup

Jelaslah, krisis listrik di tanah air bukan semata persoalan teknis. Krisis ini berkaitan erat dengan tata kelola yang